

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya antara akuntansi keuangan dan perpajakan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrumen pentransfer sumber daya (fungsi *budgeter*), akan tetapi acapkali pula digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Basis pengenaan penghasilan untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis perhitungan penghasilan untuk keperluan komersial, atau dengan perkataan lain akibat dari perbedaan rekognisi penghasilan dan biaya, maka akan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua basis tersebut. Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Kena Pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah, disebut sebagai “*PPh terutang - Income Tax Payable* atau *Income Tax Liability*” sedang Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Sebelum

Pajak, disebut sebagai “*Beban Pajak Penghasilan – Income Tax Expense* atau *Provision for Income Taxes*”.

Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial, dalam akun pajak tangguhan (*deferred tax*) baik aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhannya. Aspek perpajakan, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Dalam perkembangannya, Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) membedakan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal terdiri dari perbedaan permanen dan temporer. Agoes dan Trisnawati (2013:238) mengungkapkan bahwa perbedaan permanen dapat terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap/permanen mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak/*pre tax income*) yang

berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PhKP (*taxable income*).

Perbedaan temporer/beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, dan kompensasi kerugian fiskal. Perbedaan temporer ini akan menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Penerapan komponen pembentuk pajak tangguhan mempunyai konsekuensi terhadap penghematan beban pajak di masa depan. Dengan kata lain, dapat diperoleh fakta bahwa aset pajak tangguhan berperan sebagai prediktor arus kas yang mana semakin tinggi aset pajak tangguhan dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula implikasinya terhadap arus kas perusahaan sehingga dapat menghemat beban pajak di masa depan. Bersinggungan dengan pernyataan di atas, liabilitas pajak tangguhan justru akan mengakibatkan penambahan beban pajak di masa depan.

Penambahan tersebut diduga karena dengan adanya liabilitas pajak tangguhan, dengan kata lain perusahaan memiliki hutang yang masih harus dibayar atau dilunasi sehingga berimplikasi menurunkan aliran arus kas perusahaan di masa depan. Penghematan dan penambahan beban pajak ini akan mempengaruhi arus kas di masa depan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama laporan keuangan. Penerapan pajak tangguhan untuk memprediksikan arus kas perusahaan di masa depan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Cheung, dkk. (1997) menggunakan kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan sebagai kriteria untuk mengevaluasi kegunaan informasi pajak

tanggungan serta apakah informasi pajak tanggungan berpengaruh atas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Cheung, dkk. (1997) menganalisis data dari tahun 1977-1994 dan sekaligus membuktikan pengaruh pajak tanggungan terhadap arus kas. Cheung, dkk. (1997) menggunakan 2 pengukuran variabel pajak tanggungan. Pertama, pajak tanggungan diukur sebesar nilai beban pajak tanggungan pada laporan laba rugi periode  $t$ . Kedua, pajak tanggungan diukur sebesar selisih saldo liabilitas pajak tanggungan pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$ . Lorek dan Willinger (1996, dalam Rachmawati, 2010) mengimplementasikan akun-akun akrual, seperti laba usaha, piutang, persediaan, dan hutang sebagai prediktor arus kas. Hasil penelitian Cheung, dkk. (1997) memperlihatkan bahwa pajak tanggungan mempunyai cakupan informasi untuk memprediksikan arus kas.

Legoria dan Sellers (2005) mengembangkan model Cheung, dkk. (1997) dengan memisahkan antara aset pajak tanggungan dengan liabilitas pajak tanggungan sebagai variabel yang digunakan untuk memprediksikan arus kas. Variabel kontrol yang digunakan Legoria dan Sellers (2005) adalah ukuran perusahaan, dimana hasil penelitiannya mendukung Cheung, dkk. (1997). Variabel aset pajak tanggungan, liabilitas pajak tanggungan dan cadangan penyisihan aset pajak tanggungan mempunyai kemampuan sebagai prediktor arus kas di masa depan. Penelitian-penelitian oleh para ahli di atas telah menunjukkan secara empiris bahwa komponen-komponen yang

diperoleh dari SFAS No. 109 memiliki kandungan informasi yang *reliable* jika diterapkan di masa depan oleh perusahaan.

Phillips, dkk. (2004) menggunakan aset pajak tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan yang diperoleh dari Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SFAS No. 109 yang mengungkapkan bahwa aset dan liabilitas pajak tangguhan bersih dalam suatu perusahaan terdiri dari beberapa komponen: (1) pendapatan dan beban yang masih harus dibayar dan cadangan, (2) kompensasi, (3) penyusutan dari aset berwujud, (4) penilaian aset lain, misalnya biaya yang terkait dengan aset tidak berwujud, persediaan, dan sewa, (5) *item* lain-lain, (6) kompensasi pajak, (7) keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari surat berharga, (8) penyisihan penilaian aset pajak tangguhan.

Penelitian ini bermaksud untuk mendukung secara empiris paragraf 16 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, yang menyatakan bahwa informasi sumber daya ekonomi mempunyai kemampuan untuk memprediksikan kas dan setara kas. PSAK No. 46 sebagai salah satu bentuk akrual yang nantinya diharapkan dapat memenuhi paragraf 16 tersebut. Komponen-komponen PSAK No. 46 yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan secara parsial berimplikasi untuk memprediksikan arus kas. Kesenjangan antara penelitian ini dengan penelitian Cheung, dkk. (1997) dan Legoria dan Sellers (2005) adalah: (1) peraturan perpajakan yang diterapkan dan berlaku di Indonesia tidak sama dengan yang berlaku di Amerika Serikat, (2) pengukuran

variabel pajak tangguhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekomposisi aset dan liabilitas pajak tangguhan berdasarkan pengungkapan PSAK No. 46 yang diterapkan oleh perusahaan.

Dekomposisi aset pajak tangguhan dibagi menjadi kompensasi kerugian, imbalan pasca kerja dan perbedaan temporer lainnya. Liabilitas pajak tangguhan terdiri dari komponen-komponennya, yaitu penyusutan dan amortisasi, penyusutan aset sewa guna usaha dan perbedaan temporer lainnya. Dekomposisi aset dan liabilitas pajak tangguhan merujuk pada penelitian yang digunakan oleh Philips, dkk (2004) yaitu mendistribusikan komponen liabilitas pajak tangguhan bersih sesuai dengan pengungkapan yang ditetapkan oleh SFAS No. 109 untuk mendeteksi adanya manajemen laba, (3) pengukuran variabel kontrol ukuran perusahaan sebesar selisih periode  $t$  dengan periode  $t-1$ .

Pengukuran variabel ini merujuk pada penelitian Barth, dkk. (2001)(4) penelitian ini menggunakan pengungkapan PSAK No. 46 untuk menganalisis kemampuan pajak tangguhan dalam memprediksikan arus kas operasional satu periode ke depan. Penelitian ini menguji tentang bagaimana pengaruh dekomposisi pajak tangguhan terkait kemampuannya dalam memprediksi arus kas. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2010-2012. Peneliti memilih periode pengamatan tersebut, karena berdasarkan fenomena yang berkembang saat ini menurut Anggota dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) menuturkan setiap tahun sektor pertambangan merugikan negara senilai Rp. 30 triliun. Pada tahun 2013 perusahaan tambang mengemplang pajak meningkat senilai Rp. 628 miliar dari tahun sebelumnya Rp. 328 miliar di tahun 2011 dan Rp. 486 miliar di tahun 2012. Nilai tersebut adalah hasil audit yang dilakukan lembaga BPK selama tiga tahun terakhir (Tunggakan Pajak Sektor Pertambangan Meningkat, 2014). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh prospek dari perusahaan pertambangan yang belakangan semakin menurun, dimana tercatat pada data IHSG periode tahun 2008 hingga 2012, indeks sektor pertambangan mengalami penurunan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang. Seorang analis Buana Capital, Alfred Nainggolan, menyatakan bahwa prospek industri sektor pertambangan masih diyakini kurang begitu bagus walaupun pemerintah sudah berupaya untuk melakukan renegotiasi kontrak pada 83 perusahaan tambang. Hal ini didasarkan pada harga batubara dan *demand* yang tidak bagus untuk saat sekarang, yang diperkuat juga oleh IHSG sektor pertambangan sampai akhir penutupan tanggal 11 Maret 2014 yang masih mengalami penurunan hingga 1 persen atau 14,26 poin pada kisaran nilai 1.378,31 (Rezy, dkk., 2014).

Memperhatikan kondisi yang terjadi pada industri sektor pertambangan tentunya menjadi hal yang sangat ironis karena industri pada sektor ini seharusnya memiliki prospek yang cerah karena potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga perusahaan sektor pertambangan dapat memberikan

laporan pajak yang bersifat riil kepada pemerintah dan tidak berusaha untuk menanggukhan pajak bahkan sampai menggelapkan laporan pajaknya.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan akar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.
  - a. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh positif pada arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - b. Apakah aset pajak tangguhan terkait dengan komponen kompensasi kerugian berpengaruh positif pada arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - c. Apakah aset pajak tangguhan terkait dengan komponen imbalan pasca kerja berpengaruh positif pada arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - d. Apakah aset pajak tangguhan terkait dengan komponen perbedaan temporer lainnya berpengaruh positif pada arus kas operasional perusahaan di masa depan.
2.
  - a. Apakah liabilitas pajak tangguhan berpengaruh negatif pada arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - b. Apakah liabilitas pajak tangguhan terkait dengan komponen penyusutan dan amortisasi berpengaruh negatif pada arus kas operasional perusahaan di masa depan.

- c. Apakah liabilitas pajak tangguhan terkait dengan komponen penyusutan aset tetap sewa guna usaha berpengaruh negatif pada arus kas operasional perusahaan di masa depan.
- d. Apakah liabilitas pajak tangguhan terkait dengan komponen perbedaan temporer lainnya berpengaruh negatif pada arus kas operasional perusahaan di masa depan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- 1.
  - a. Untuk memperoleh bukti empiris apakah aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - b. Untuk memperoleh bukti empiris apakah aset pajak tangguhan terkait dengan komponen kompensasi kerugian berpengaruh positif terhadap arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - c. Untuk memperoleh bukti empiris apakah aset pajak tangguhan terkait dengan komponen imbalan pasca kerja berpengaruh positif terhadap arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - d. Untuk memperoleh bukti empiris apakah aset pajak tangguhan terkait dengan komponen perbedaan temporer

lainnya berpengaruh positif terhadap arus kas operasional perusahaan di masa depan.

2.
  - a. Untuk memperoleh bukti empiris apakah liabilitas pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - b. Untuk memperoleh bukti empiris apakah liabilitas pajak tangguhan terkait dengan komponen penyusutan dan amortisasi berpengaruh negatif terhadap arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - c. Untuk memperoleh bukti empiris apakah liabilitas pajak tangguhan terkait dengan komponen penyusutan aset tetap sewa guna usaha berpengaruh negatif terhadap arus kas operasional perusahaan di masa depan.
  - d. Untuk memperoleh bukti empiris apakah liabilitas pajak tangguhan terkait dengan komponen perbedaan temporer lainnya berpengaruh negatif terhadap arus kas operasional perusahaan di masa depan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Akademik**

Penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai implementasi atau penerapan komponen aset pajak tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan sebagai sarana guna memprediksi aliran arus kas dalam perusahaan serta mengetahui bagaimana aplikasinya di kehidupan nyata sehingga

dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu Penggunaan Komponen-Komponen Pembentuk Pajak Tangguhan.

#### **b. Manfaat Praktik**

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak institusi pendidikan sehubungan dengan penyebaran informasi perpajakan terkait *tax knowledge*. Serta diharapkan pula dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan yang sejenis. Selain itu, penelitian ini bermaksud untuk memberikan kontribusi terhadap riset akuntansi dan perpajakan terkait dengan pengujian perbedaan laba menurut akuntansi dengan perpajakan sebagai sumber informasi penting kepada masyarakat pasar modal dan *stakeholders* lainnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## 2. BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan dalam penelitian, pengembangan hipotesis penelitian, dan model analisis.

## 3. BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan; serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## 4. BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

## 5. BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian ini, serta saran untuk penelitian selanjutnya.